

**PENGARUH TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA, UPAH
MINIMUM, DAN INVESTASI, TERHADAP KEMISKINAN
DI INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S1)
Pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Padang*



Oleh :

**ADELA DELVIERA
20060065/2020**

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGARUH TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA, UPAH MINIMUM,
DAN INVESTASI, TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA**

Nama : Adela Delviera
NIM/TM : 20060065/2020
Departemen : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

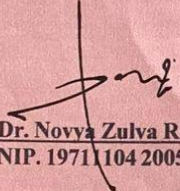
Padang, 4 Februari 2025


Mengetahui,

Disetujui dan Disahkan Oleh :

Kepala Departemen Ilmu Ekonomi,

Pembimbing


Dr. Novya Zulva Riani, SE, M.Si
NIP. 19711042005012001


Prof. Dr. Syamsul Amar B.M.S
NIP. 195710211986031001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Skripsi Jurusan

Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Negeri Padang

PENGARUH TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA, UPAH MINIMUM, DAN INVESTASI, TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA

Nama : Adela Delviera

NIM/TM : 20060065/2020


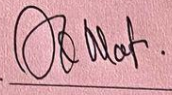
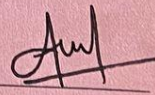
Keahlian : Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan

Jurusan : Ilmu Ekonomi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, 4 Februari 2025

Tim Penguji :

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Prof. Dr. Syamsul Amar B, M.S	1. 
2.	Anggota	Dr. Joan Marta, S.E, M.Si	2. 
3.	Anggota	Ariusni, SE., M.Si.	3. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adela Delviera
NIM / Tahun Masuk : 200600065 / 2020
Tempat / Tanggal Lahir : Toboh Olo/ 3 Mei 2002
Departemen / Keahlian : Ilmu Ekonomi / Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum, dan Investasi, Terhadap Kemiskinan di Indonesia
No. HP : 0895374766174

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis (skripsi) saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana) , baik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang maupun Program Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan orang lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lainyang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara ekplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditanda tangani asli oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Jurusan.

Demikian pernyataan ini sata buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka daya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, 14 Februari 2025
Yang Menyatakan



Adela Delviera
NIM. 20060043

ABSTRAK

Adela Delviera (20060065) : Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum, Dan Investasi, Terhadap Kemiskinan. Skripsi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri padang. Dibawah Bimbingan Bapak Prof. Dr. Syamsul Amar B, MS.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja, upah minimum, dan investasi, terhadap kemiskinan.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan tiga variabel independen yaitu partisipasi tenaga kerja, upah, dan investasi, dengan variabel terikat adalah kemiskinan.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan metode *Random effect model* dengan *cross section* 34 Provinsi di Indonesia dan *Time series* 2018-2022. Hasil menemukan bahwa investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Sementara, partisipasi tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia dan upah minimum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Hal ini, mengindikasikan bahwa pendidikan dan keterampilan yang rendah menyebabkan pendapatan yang diterima oleh tenaga kerja tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, serta ketimpangan antar daerah menyebabkan upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia. Maka, pemerintah harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan pendapatan dalam pengetasan kemiskinan di Indonesia.

Kata Kunci : Kemiskinan, *Random Effect Model*, Data panel

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS... 15	
A. Kajian Teori.....	15
1. Kemiskinan	15
B. Penelitian Terdahulu.....	35
C. Kerangka Konseptual	38
D. Hipotesis	41
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Tempat dan Waktu Penelitian	43
C. Jenis dan Sumber Data	43
D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Definisi Operasional Variabel.....	44
F. Metode Analisa Data.....	46
BAB IV	54
HASIL DAN PEMBAHASAN	54
A. HASIL	54
B. PEMBAHASAN	76
BAB V.....	82
KESIMPULAN DAN SARAN	82
A. KESIMPULAN	82

B. SARAN	83
LAMPIRAN.....	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	9
Gambar 1.2 : Investasi Penanaman Modal.....	11
Gambar 1.3 : Upah Minimum Provinsi Di Indonesia	13
Gambar 2.1 : Kurva Upah Minimum	30
Gambar 2.2 : Kerangka Konseptual	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Persentase penduduk miskin Menurut Kabupaten / Kota di Indonesia ..	7
Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu	44
Tabel 4. 1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2022 (%).....	55
Tabel 4. 2 Perkembangan Partisipasi Tenaga Kerja Provinsi di Indonesia Dari Tahun 2018-2022 (%)	60
Tabel 4. 3 Perkembangan Tingkat Upah Provinsi di Indonesia Dari Tahun 2018-2022 (Rupiah)	64
Tabel 4. 4 Perkembangan Tingkat Investasi Provinsi di Indonesia Dari Tahun 2018-2024 (Miliar Rupiah)	67
Tabel 4. 5 Hasil Uji Chow	69
Tabel 4. 6 Hasil Uji Hausman	71
Tabel 4. 7 Hasil Uji Multikolinearitas	71
Tabel 4. 8 Hasil Uji Heterokedasitas.....	72
Tabel 4. 9 Hasil Regresi Data Panel <i>Cross-Section Weight</i>	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidak mampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam mengalami kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik. Kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan adalah kondisi seseorang yang hanya dapat memenuhi kebutuhan makannya kurang dari 2100 kalori perkapita per hari.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengemukakan beberapa faktor yang berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Dalam penelitian yang dikemukakan oleh Niswati (2014), tenaga kerja berpengaruh terhadap kemiskinan. Semakin tinggi produktivitas tenaga kerja maka akan menaikkan pendapatan masyarakat sehingga kebutuhan hidup terpenuhi dan kemiskinan semakin berkurang. Menurut Islami dan Anis (2019) pendidikan juga memiliki peran dalam

kemiskinan di Indonesia. Dengan pendidikan, seseorang akan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang akan berdampak nantinya pada produktifitas dan pekerjaan. Namun penelitian yang sudah ada masih memasukkan laki-laki dan perempuan dalam satu golongan. Ironisnya, terdapat sebuah fenomena dimana lebih banyak penduduk miskin perempuan dari pada laki-laki, dan dalam lingkup kemiskinan yang serupa perempuan lah yang lebih menderita dibandingkan laki-laki.

Salah satu permasalahan yang masih dihadapi oleh negara Indonesia yaitu masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi prioritas pembangunan. Selama ini, pemerintah Indonesia telah banyak memiliki program-program untuk pengentasan kemiskinan yang ada. Upaya pengentasan kemiskinan terdapat dua strategi yang harus di tempuh. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok Masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan mereka dari berbagai bidang. Kedua, melakukan pelatihan kepada mereka agar mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha pencegahan terjadinya kemiskinan baru. Upaya pengentasan kemiskinan dilakukan untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu, terciptanya masyarakat yang adil dan makmur (Royat, 2015).

Agrawal (2008) menyatakan bahwa provinsi dengan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi mengalami penurunan kemiskinan yang lebih cepat. Karena dengan peningkatan perekonomian nantinya mampu menciptakan lapangan kerja

yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduknya sehingga satu sasaran pembangunan nasional yaitu menurunkan tingkat kemiskinan dapat terwujud. Beberapa hasil penelitian yang dilakukan memberikan hasil yang sama, dimana penelitian Kraay (2006) memberikan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan.

Sulitnya penekanan angka kemiskinan juga terjadi di Provinsi Indonesia. Berikut ini data persentase penduduk miskin di Indonesia per tahun periode 2010 – 2020. Berdasarkan Tabel 1.1 menjabarkan persentase kemiskinan di Provinsi Indonesia selama periode 2010 hingga 2020 yang mencerminkan dinamika positif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Terdapat penurunan yang signifikan dari 9,4% pada tahun 2010 menjadi 6,2% pada tahun 2020, menandakan perbaikan kesejahteraan di wilayah ini.

Tabel 1.1 Persentase penduduk miskin Menurut Provinsi di Indonesia

Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022
Aceh	15,68	15,32	14,99	15,33	14,64
Sumatera Utara	8,94	8,83	8,75	9,01	8,42
Indonesia	6,55	6,42	6,28	6,63	5,92
Riau	7,21	7,08	6,82	7,12	6,78
Jambi	7,85	7,6	7,58	8,09	7,62
Sumatera Selatan	12,82	12,71	12,66	12,84	11,9
Bengkulu	15,41	15,23	15,03	15,22	14,62
Lampung	13,01	12,62	12,34	12,62	11,57
BangkaBelitung	4,77	4,62	4,53	4,9	4,45
Kepulauan Riau	5,83	5,9	5,92	6,12	6,24
DKI Jakarta	3,55	3,47	4,53	4,72	4,69
Jawa Barat	7,25	6,91	7,88	8,4	8,06
Indonesia	11,19	10,8	11,41	11,79	10,93
DI Yogyakarta	11,81	11,7	12,28	12,8	11,34
Jawa Timur	10,85	10,37	11,09	11,4	10,38
Banten	5,25	5,09	5,92	6,66	6,16
Bali	3,91	3,79	3,78	4,53	4,57
Nusa Tenggara Barat	14,63	14,56	13,97	14,14	13,68
Nusa Tenggara Timur	21,03	21,09	20,9	20,99	20,05
Kalimantan Barat	7,37	7,49	7,17	7,15	6,73
Kalimantan Tengah	5,1	4,98	4,82	5,16	5,28
Kalimantan Selatan	4,65	4,55	4,38	4,83	4,49
Kalimantan Timur	6,06	5,94	6,1	6,54	6,31
Kalimantan Utara	6,86	6,63	6,8	7,36	6,77
Sulawesi Utara	7,59	7,66	7,62	7,77	7,28
Sulawesi Tengah	13,69	13,48	12,92	13	12,33
Sulawesi Selatan	8,87	8,69	8,72	8,78	8,63
Sulawesi Tenggara	11,32	11,24	11	11,66	11,17
Gorontalo	15,83	15,52	15,22	15,61	15,42
Sulawesi Barat	11,22	11,02	10,87	11,29	11,75
Maluku	17,85	17,69	17,44	17,87	15,97
Maluku Utara	6,62	6,77	6,78	6,89	6,23
Papua Barat	22,66	22,17	21,37	21,84	21,33
Papua	27,43	27,53	26,64	26,86	26,56
Indonesia	9,66	9,41	9,78	10,14	9,54

Sumber : Badan Pusat Statistik, Data Diolah

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2022 menggambarkan seberapa besar persentase dalam tingkat kemiskinan antar provinsi di Indonesia. Persentase kemiskinan tertinggi tercatat pada tahun 2021 yang mencapai 10,14%. Sedangkan persentase kemiskinan terendah pada tahun 2020 yaitu 9,78%. Fluktuasi ini menunjukkan dinamika yang kompleks dalam perubahan tingkat kemiskinan di Indonesia selama periode tersebut, dengan adanya peningkatan yang diikuti oleh penurunan dalam rentang waktu yang relatif singkat.

Selain itu, analisis data tersebut juga mengungkapkan disparitas yang signifikan antara provinsi-provinsi dalam hal tingkat kemiskinan. Provinsi-provinsi seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur cenderung memiliki persentase penduduk miskin yang lebih tinggi, sementara provinsi-provinsi seperti DKI Jakarta dan Bali memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah untuk mengatasi masalah kemiskinan secara efektif.

Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan perlunya kebijakan yang berfokus pada pengentasan kemiskinan yang berbasis lokal serta strategi yang komprehensif dan terarah untuk mengurangi kesenjangan sosial. Data ini menyoroti pentingnya upaya bersama dari pemerintah pusat dan daerah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, untuk menciptakan kebijakan yang

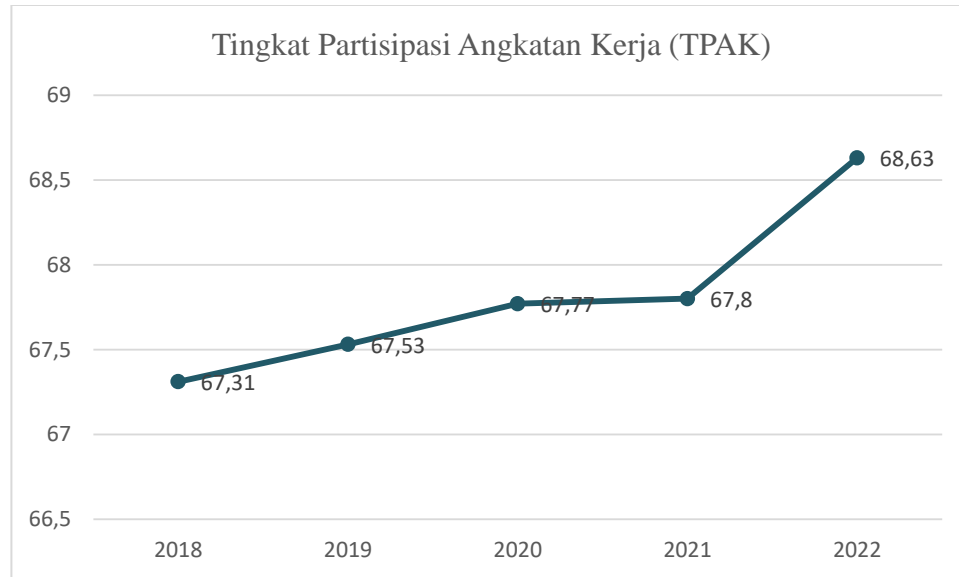
inklusif dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Sebagai implikasi kebijakan, temuan ini memberikan kerangka kerja bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk merancang dan mengimplementasikan strategi pembangunan yang berfokus pada inklusi sosial dan pemerataan ekonomi. Analisis ini memberikan kontribusi penting untuk menyusun kebijakan yang berorientasi pada hasil, dengan memahami dinamika kompleks ketidaksetaraan dan kemiskinan di tingkat lokal dalam konteks pembangunan regional di Indonesia.

Tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki hubungan yang erat dengan tingkat kemiskinan dalam suatu ekonomi. Kemiskinan merupakan gambaran kehidupan di banyak negara berkembang yang mencakup lebih dari satu milyar penduduk dunia, kurangnya akses terhadap peluang kerja serta terbatasnya kesempatan kerja adalah salah satu karakteristik kemiskinan.

Menurut Mulyadi (2003) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah situasi yang menggambarkan jumlah angkatan kerja dalam suatu kelompok umum sebagai presentase penduduk dalam kelompok umur tersebut. Adapun dalam Badan Pusat Statistik (2016) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap penduduk yang berumur 15 tahun ke atas.

Dalam satuan persen 2018-2022



Gambar 1.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

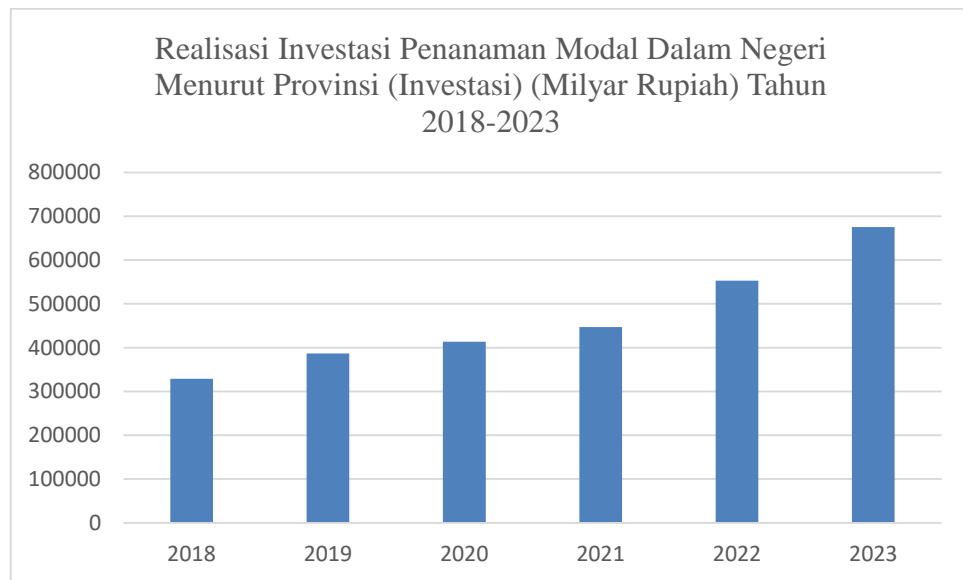
Sumber : Badan Pusat Statistik, Data Diolah

Berdasarkan Gambar 1.1 Tingkat partisipasi tenaga kerja di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang stabil dari tahun 2018 hingga 2022. Pada tahun 2022, tingkat partisipasi mencapai puncaknya dengan angka 68,63%, menandakan kemajuan yang signifikan dalam keterlibatan tenaga kerja dalam kegiatan ekonomi. Peningkatan ini mungkin mencerminkan keberhasilan berbagai kebijakan pemerintah yang didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, upaya dalam meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Sebaliknya, tahun 2018 menunjukkan tingkat partisipasi tenaga kerja yang lebih rendah sebesar 67,31%, mencerminkan tantangan ekonomi dan sosial yang mungkin dihadapi pada saat itu, seperti fluktuasi ekonomi global atau ketidakpastian dalam kebijakan domestik. Meskipun begitu, fluktuasi tahunan yang relatif kecil dalam rentang data menunjukkan bahwa ada stabilitas dalam partisipasi tenaga kerja selama periode tersebut, meskipun kondisi ekonomi dan kebijakan dapat memengaruhi perubahan tersebut dari tahun ke tahun.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Duflo et al (2012) menyoroti pentingnya peningkatan partisipasi dan upah sebagai strategi untuk mengurangi kemiskinan. Sebagian besar populasi miskin sering kali terlibat dalam sektor pertanian, dan peningkatan partisipasi di sektor ini dapat menciptakan peluang ekonomi yang signifikan untuk mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, penelitian dan kebijakan yang mendukung peningkatan partisipasi sektor pertanian dan sektor-sektor yang dapat menyerap tenaga kerja secara efektif dapat memberikan kontribusi yang besar dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan dalam suatu negara. Mughal & Rehman (2016) mencatat bahwa orang miskin umumnya menghadapi sejumlah hambatan dan kesulitan dalam beradaptasi dengan sektor ekonomi non-pertanian untuk mencari pekerjaan

Menurut Provinsi (Investasi) (Milyar Rupiah)



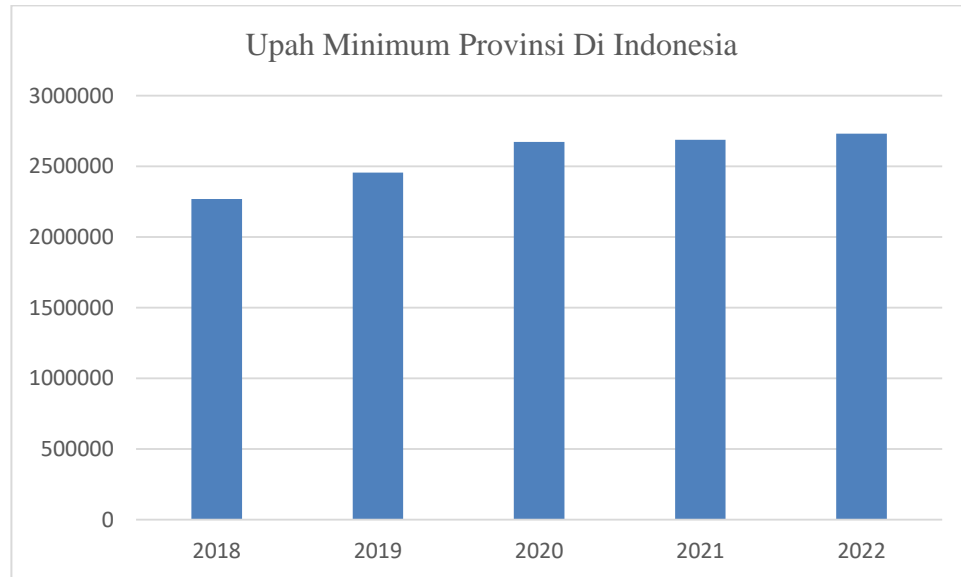
Gambar 1.2 Investasi Penanaman Modal

Sumber : Badan Pusat Statistik, Data Diolah

Data pada Gambar 1.2 merupakan realisasi investasi penanaman modal dalam negeri menurut provinsi, yang diukur dalam miliar Rupiah, dari tahun 2018 hingga 2023. Terlihat bahwa investasi mengalami fluktuasi yang signifikan selama periode tersebut. Dari tahun 2018 hingga 2020, terjadi peningkatan yang konsisten dari 328.604,9 miliar Rupiah pada tahun 2018 menjadi 413.535,5 miliar Rupiah pada tahun 2020. Namun, pada tahun 2021, terjadi lonjakan yang cukup besar, mencapai 447.063,6 miliar Rupiah. Kemudian, terjadi peningkatan yang lebih besar lagi pada tahun 2022, mencapai 552.769 miliar Rupiah, sebelum mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan 674.923,4 miliar Rupiah.

Adapun yang variabel lain yang mempengaruhi kemiskinan yakni : upah minimum dan investas Lustig dan McLeod (1997) mengevaluasi dampak upah minimum terhadap kemiskinan untuk data cross section sejumlah Negara berkembang di Amerika Latin, Asia dan Afrika. Mereka menggunakan regresi antara headcount ratio dan beberapa ukuran kemiskinan lainnya (seperti poverty gap dan kebutuhan kalori perkapita) dan factor-faktor yang menentukan kemiskinan seperti upah riil, pertumbuhan income per capita dan beberapa variable independen lainnya seperti human capital stock dan share angkatan kerja di sektor pertanian. Hasil yang diperoleh dari studi tersebut adalah kenaikan upah minimu dapat meningkatkan konsumsi kalori per kapita dan mengurangi kemiskinan Dalam jangka pendek, tetapi dapat mengurangi kesempatan bekerja dalam jangka panjang. Meskipun temuan utamanya adalah upah minimum dapat mengurangi kemiskinan, namun disimpulkan bahwa upah minimum bukan sebagai alat terbaik untuk mengurangi kemiskinan.

Faktor yang mempengaruhi kemiskinan selanjutnya adalah investasi. Penanganan kemiskinan membutuhkan dana yang cukup besar, salah satu alternatif pendanaan penanganan kemiskinan adalah investasi. Menurut penelitian Tarigan (2021) menyebutkan investasi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, artinya semakin meningkatnya investasi akan mengakibatkan menurunnya Penduduk miskin.



Gambar 1.3 Upah Minimum Provinsi Di Indonesia Tahun 2018-2022
Sumber : Badan Pusat Statistik, Data Diolah

Gambar 1.3 memperlihatkan perkembangan rata-rata upah minimum provinsi dari tahun 2018 hingga 2022. Rata-rata upah minimum provinsi mengalami peningkatan yang signifikan dari 2.268.874,193 pada tahun 2018 menjadi 2.729.463,159 pada tahun 2022. Terlihat bahwa terdapat pertumbuhan yang stabil selama lima tahun tersebut, dengan peningkatan tertinggi terjadi antara tahun 2018 dan 2020, sebelum mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 dan kembali naik pada tahun 2022. Pertumbuhan upah minimum provinsi dari tahun 2018 ke 2019 menunjukkan kenaikan sebesar 8,2%, naik dari 2.268.874,193 menjadi 2.455.662,228. Selanjutnya, dari tahun 2019 ke 2020, terjadi pertumbuhan sebesar 8,8%, dengan upah meningkat dari 2.455.662,228 menjadi 2.672.371,355. Meskipun terjadi sedikit penurunan dari tahun 2020 ke 2021 sebesar 0,5%, dengan upah menurun dari 2.672.371,355 menjadi

2.687.723,687, namun kembali mengalami kenaikan pada tahun 2022 sebesar 1,6%, naik dari 2.687.723,687 menjadi 2.729.463,159. Temuan ini mencerminkan peningkatan finansial terkait upah minimum provinsi dari waktu ke waktu, menyoroti potensi pertumbuhan yang kuat di masa depan.

Selanjutnya, berdasarkan hasil kajian akan merekomendasikan kebijakan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam rangka menghadapi era bonus demografi. Dengan demikian, era ini dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk meningkatkan perekonomian daerah khususnya dan mendukung peningkatan perekonomian nasional pada umumnya sehingga di era bonus demografi nantinya tidak akan terjadi gelombang pengangguran massal, khususnya pengangguran usia muda pada dekade 2020–2030 yang akan datang.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait meneliti Pengaruh variabel tingkat partisipasi angkatan kerja , upah minimum, dan investasi Terhadap kemiskinan di Indonesia. Meneliti pengaruh variabel tingkat partisipasi angkatan kerja sektoral, upah minimum, investasi, dan konsumsi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia memiliki manfaat signifikan dalam pemahaman faktor-faktor yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Dengan menggali hubungan antara tingkat partisipasi angkatan kerja di sektor-sektor tertentu, besaran upah minimum, tingkat investasi, dan pola

konsumsi dengan tingkat kemiskinan, penelitian ini dapat memberikan pandangan yang lebih holistik terhadap dinamika ekonomi dan sosial di Indonesia. Hasil penelitian dapat memberikan dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi tingkat kemiskinan, dengan fokus pada peningkatan partisipasi tenaga kerja berkualitas, peningkatan upah yang berkelanjutan, dorongan investasi, dan stimulasi konsumsi yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor penggerak kemiskinan dan pilihan kebijakan yang relevan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang penulis paparkan, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Sejauh manakah pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap kemiskinan di Indonesia ?
2. Sejauh manakah pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan di Indonesia ?
3. Sejauh manakah pengaruh investasi terhadap kemiskinan di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh :

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja sektor terhadap kemiskinan di Indonesia ?
2. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan di Indonesia ?
3. Untuk mengetahui pengaruh investasi terhadap kemiskinan di Indonesia ?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Sebagai sarana penambah ilmu dan pendalaman serta pemahaman materi terkait masalah yang diteliti.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai literature atau studi banding bagi peneliti yang melakukan penelitian dengan pembahasan yang sama.

3. Bagi universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan kepustakaan bagi universitas.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil analisis menunjukan bahwa tingkat partisipasi tenaga kerja (TPAK) berpengaruh positif dan signifikan, hal ini menunjukan bahwa peningkatan partisipasi tenaga kerja mendorong kemiskinan. Karena peningkatan partisipasi tenaga kerja dengan tingkat keterampilan dan pendidikan yang rendah tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya melalui upah yang mereka dapatkan, sehingga mendorong tingkat kemiskinan. Selanjutnya, hasil analisis menunjukan bahwa upah berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, hal ini menunjukan bahwa peningkatan upah tidak mampu mengurangi tingkat kemiskinan. Hasil analisis juga menunjukan bahwa investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini, dengan meningkatnya investasi mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, sehingga meningkatkan partisipasi tenaga kerja yang mengurangi tingkat kemiskinan.

B. SARAN

Berdasarkan Kesimpulan dalam penelitian, maka diperoleh beberapa saran untuk penelitian selanjutnya dan pemerintah untuk pengetasan kemiskinan sebagai berikut:

1. Tingkat partisipasi tenaga kerja (TPAK) merupakan salah satu faktor penting dalam pengetasan kemiskinan, maka pemerintah perlu mendorong peningkatan skill dan pendidikan untuk mengoptimalkan pendapatan yang diterima masyarakat terutama masyarakat miskin. Sehingga, pendapatan yang mereka juga meningkat yang mampu mendorong penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia.
2. Pemerataan pembangunan dan infrastruktur mendorong peningkatan investasi yang berpengaruh signifikan dalam pengetasan kemiskinan. Untuk itu, pemerintah perlu intervensi dalam pemerataan pembangunan agar investasi mampu meningkatkan lapangan pekerjaan dan mengatasi masalah kemiskinan.
3. Penulis mengharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat lebih mengembangkan faktor-faktor yang menjadi faktor utama dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Adams Jr, R. H., & Cuecuecha, A. (2013). The impact of remittances on investment and poverty in Ghana. *World Development*, 50, 24–40.
- Adiana, P. P. E., & Karmini, N. L. (2012). Pengaruh Pendapatan, Jumlah Anggota Keluarga dan Pendidikan Terhadap Pola Konsumsi Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Gianyar. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana (EEP)*, 1(1), 39–48.
- Anggraini, nita. 2012.hubungan kausalitas dari tingkat pendidikan, pendapatan, dan konsumsi terhadap jumlah penduduk miskin di provinsi jawa tengah. skripsi. fakultas ekonomi universitas dipenogoro.
- Apergis, N., & Rezitis, A. (2003). An examination of Okun's law: Evidence from regional areas in Greece. *Applied Economics*, 35(10), 1147-1151. doi: <https://doi.org/10.1080/0003684032000066787>.
- Astuti, H. W., & Soetarmiyati, N. (2016). Mengukur peluang dan ancaman bonus demografi terhadap kualitas sumberdaya manusia dalam pembangunan ekonomi di Bandar Lampung. *Jurnal Bisnis Darmajaya*, 2(1), 57-76.
- Azmi, A. A., & Cholily, V. H. (2023). Analisis Pengaruh Partisipasi Tenaga Kerja dan Pendidikan Perempuan terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2010-2020. *Langgas: Jurnal Studi Pembangunan*, 2(1), 37-47.
- Bashir, S., Gebremedhin, T., & Chawdhry, M. A. (2014). Does self-employment enhance regional economic development. *Journal of Developmental Entrepreneurship*, 19(04), 1450025. doi: <https://doi.org/10.1142/S1084946714500253>.

- Blanchard, O. (2011). *Macroeconomics* (2nd Editon). New Jersey: Printice-Hall.
- Bloom, D. E., Canning, D., & Sevilla, J. (2003). *The demographic dividend: A new perspective on the economic consequences of population change*. Rand Corporation
- Darman, D. (2013). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran: Analisis hukum Okun. *The Winners*, 14(1), 1-12. doi: <https://doi.org/10.21512/tw.v14i1.639>.
- Elfindri, & Bachtiar, N. (2004). *Ekonomi ketenagakerjaan*. Padang: Andalas University Press.
- Ellya Rosana.(2019). kemiskinan dalam perspektif structural fungsional. *Jurnal Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* DOI: <https://doi.org/10.24042/ajsla.v14i1.4483>
- Esti, H., & Brodjonegoro, B. P. (2003). Simulasi partisipasi tenaga kerja dengan pendekatan demometrik. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 3(2), 125-138. doi: <https://doi.org/10.21002/jepi.v3i2.621>.
- Faridi, M. Z., Chaudhry, M. O., Farooq, F., & Arif, R. (2016). Labor Force Participation and Poverty Alleviation in Pakistan : An Empirical Analysis. *Pakistan Journal of Social Sciences*, 36(2), 1251–1263.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometric* (Fifth Edit).
- Islami, N., & Anis, A. (2019). Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(3), 939. <https://doi.org/10.24036/jkep.v1i3.7721>
- Joe, W., Dash, A. K., & Agrawal, P. (2015). Demographic transition, savings, and economic growth in China and India. IEG Working Paper, 351. Institute of Economic Growth. Diakses 13 Januari 2017 dari <http://iegindia.org/upload/publication/Workpap/wp351.pdf>.
- Kelley, A. C. (1988). Economic consequences of population change in the Third World. *Journal of Economic Literature*, 26(4), 1685-1728.
- Kelley, A. C., & Schmidt, R. M. (1995). Aggregate population and economic growth correlations: The role of the components of demographic change. *Demography*, 32(4), 543-555. doi: <https://doi.org/10.2307/2061674>.
- Ledent, J. (1978). *Demometrics for Regional Development*. Options '78: a IIASA New Report, Summer Edition, pp. 1-2. International Institute for Applied Systems Analysis. Diakses 28 Desember 2015 dari <https://iiasa.ac.at/web/home/resources/publications/IIASAMagazineOptions/opt78-2sum.pdf>.
- Lee, R. (2003). *The demographic transition: Three centuries of fundamental*

- change. *Journal of Economic Perspectives*, 17(4), 167-190.
- Lin, C., & Yun, M. S. (2016). The effects of the minimum wage on earnings inequality: Evidence from China. *Research in Labor Economics*, 44, 179–212. <https://doi.org/10.1108/S0147-912120160000044012>
- Litwin, B. S. (2015). Determining the Effect of the Minimum Wage on Income Inequality.
- Mankiw, N. G. (2007). *Makroekonomi (Edisi Keenam)*. Jakarta: Erlangga.
- Mathur, V. K., & Rosen, H. S. (1972). An econometric export base model of regional growth: A departure from conventional techniques. In A. G. Wilson (ed.), *London papers in regional science: Patterns and processes in urban and regional systems*, Vol. 3, pp. 31-43, London.
- McDonald, P. (2014). The demography of Indonesia in comparative perspective. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 50(1), 29-52. doi: <https://doi.org/10.1080/00074918.2014.896236>.
- Monograph Reports MR-1274-WFHF/DLPF/RF/UNPF. RAND Corporation. doi: <https://doi.org/10.7249/MR1274>.
- Moosa, I. (2008). Economic growth and unemployment in Arab countries: Is Okun's law valid?. *Journal of Development and Economic Policies*, 10(2), 7-24.
- Mudrajat, K. (2002). A quest for industrial districts: An Empirical Study of Manufacturing Industries in Java. Paper presented at "Economic Growth and Institutional Change in Indonesia during the 19th and 20th Centuries", Amsterdam, 25-26 February 2002. Diakses 2 Maret 2016 dari <http://www.cgeh.nl/sites/default/files/economic-growth-and-institutional-change-in-indonesia/ecgrowthkuncoro.pdf>.
- Narayana, M. R. (2009). Contribution of informal economy for first demographic dividend: Evidence and implications for India. In *International Conference on Measuring Informal Sector in Developing Countries*, 24-26 September 2009, Kathmandu, Nepal. Diakses 2 Maret 2016 dari <http://www.iariw.org/papers/2009/8a%20Narayana.pdf>.
- Nizar, C., Hamzah, A., & Syahnur, S. (2013). Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(2), 1–8.
- Noor, H. F. 2015. *Ekonomi Publik: Ekonomi untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: PT. Indeks
- Okosun, I., Siwar, C., Hadi, A. S., & Nor, A. R. M. (2012). Urban poverty in Nigeria and approaches to poverty alleviation: A review. *African Journal of*

- Political Science and International Relations, 6(1), 8–14.
- Octasari, T. (2016) ‘Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2009-2013’, Pendidikan dan Ekonomi, 5. No. 6, pp. 495–502.
- Paramita, A. I. D., & Purbadharmaja, I. P. (2015). Pengaruh investasi dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi serta kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(10), 44574.
- Prasetyawan, D. T., Hanim, A., & Yuliati, L. (2017). Analisis Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. *Journal Ekuilibrium*, II(1), 45–50. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JEK/article/view/13925>
- Putri, E. M., & Putri, D. Z. (2021). Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan*, 10(2), 106. <https://doi.org/10.24036/ecosains.11564057.00>
- Putro, A. S., & Setiawan, A. H. (2013). Analisis pengaruh produk domestik regional bruto, tingkat upah minimum kota, tingkat inflasi dan beban/tanggungan penduduk terhadap pengangguran terbuka di Kota Magelang periode tahun 1990–2010. *Diponegoro Journal of Economics*, 2(3), 1-14.
- Ramdani, D. (2013). Membenahi sektor kependudukan untuk mewujudkan ketahanan nasional. Paper. Program Studi Ketahanan Nasional Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada.
- Ramirez, Carlos dkk (2015). “The Effect Of Minimum Wage On Poverty”. Washington.
- Rustiadi, E., & Nasution, A. (2017). Can Social Capital Investment Reduce Poverty in Rural Indonesia?. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(2), 109–117.
- Sholikhah, M. A. (2023). Pengaruh pengangguran terbuka, produk domestik regional bruto (pdrb), dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) terhadap tingkat kemiskinan Di Jawa Tengah dengan zakat sebagai variabel moderasi (2017-2021).
- Sinaga, A. (2005). Analisis kesempatan kerja sektoral di Propinsi Sumatera Utara (Tesis, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara).
- Siregar H, Wahyuniarti D. 2008. Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin. *Jurnal Ilmiah*.
- Sitanggang, I. R., & Nachrowi, N. D. (2004). Pengaruh struktur ekonomi pada partisipasi tenaga kerja sektoral: Analisis model demometrik di 30 propinsi

- pada 9 sektor di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 5(1), 103-133. doi: <https://doi.org/10.21002/jepi.v5i1.102>.
- Solow, R.M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65-94. <https://doi.org/10.2307/1884513>.
- Sutikno, Rizky Yulita, dkk. 2019. “Pengaruh Upah Minimum dan Investasi terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara”. Indonesia.
- Tridico, P. (2018). The determinants of income inequality in OECD countries. *Cambridge Journal of Economics*, 42(4), 1009–1042.
- Wilde, P., Llobrera, J., & Ver Ploeg, M. (2014). Population density, poverty, and food retail access in the United States: an empirical approach. *International Food and Agribusiness Management Review*, 171–186.
- Wintara, H., Masbar, R., & Suriani, S. (2021). Determinants of Socio Economic and Demographic Characteristics of Poverty in Aceh Province. *International Journal of Business, Economics, and Social Development*, 2(2), 50–56. <https://doi.org/10.46336/ijbesd.v2i2.134>